

Volume 29 Nomor 1, Januari 2024
JURNAL AKUNTANSI DAN KEUANGAN (JAK)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, Indonesia

PENGUATAN GOOD GOVERNANCE PADA PROSPEK PENGENTASAN KEMISKINAN

Syahrani Noer Fathia^{1a}, Ayu Dwiny Octary^{2b}, Rona Majidah^{3c}

¹²³Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung, Bandar Lampung/Lampung, Indonesia
syahrani.noer@feb.unila.ac.id^a, ayu.dwiny@feb.unila.ac.id^b, rona.majidah@feb.unila.ac.id^c

INFO ARTIKEL

Dikumpulkan: 12 Oktober 2023;

Diterima: 07 Desember 2023;

Terbit: 30 Januari 2024;



Volume 29, Nomor 1,

Januari 2024, pp. 28-38

<http://doi.org/10.23960/jak.v29i1.2000>

Corresponding author:

Syahrani Noer Fathia

Jl. Prof. Dr. Ir. Sumantri Brojonegoro

No.1, Gedong Meneng, Kec. Rajabasa,

Kota Bandar Lampung, Lampung 35141

Email: Syahrani.noer@feb.unila.ac.id

ABSTRACT

Poverty is a multidimensional and multi structural problem which makes poverty alleviation the main challenge for development in the 21st century. Poverty generally occurs in developing countries, but it cannot be denied that poverty can be found in developed countries. This means that countries in the Asian region cannot escape poverty. In 2017 there was a reduction of 29.1% in total poverty in the Asian Region. However, the Covid-19 pandemic has slightly hampered poverty alleviation. Main point of the research is to find out the substance of the intensification of democracy and political stability. and the level of corruption can influence poverty alleviation, with a research time span of 7 years (2015-2021). The results of this research: Democracy and Political Stability have a significant-negative effect and Corruption has a significant-positive effect on poverty alleviation. Furthermore, this research expected to encourage the welfare of Asian countries society economically and non-economically. By increasing people's welfare, the standard of living will increase and disparities in aspects of life will decrease.

Keywords: Good Governance, Poverty; methods: Quantitative

ABSTRAK

Kemiskinan merupakan masalah multidimensional dan multistruktural yang menjadikan pengentasan kemiskinan sebagai tantangan utama bagi pembangunan di abad ke-21. Kemiskinan umumnya terjadi di negara berkembang, namun tidak dapat dipungkiri bahwa kemiskinan dapat ditemukan di negara maju. Hal ini menyebabkan tidak dapat terlepasnya negara-negara di Kawasan Asia dari kemiskinan. Pada tahun 2017 terdapat penurunan sebesar 29,1% dari total kemiskinan di Kawasan Asia. Namun adanya pandemi Covid-19 sedikit menghambat pengentasan kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui substansi bagaimana intensifikasi demokrasi, stabilitas politik, dan tingkat korupsi dapat memengaruhi pengentasan kemiskinan, dengan rentang waktu penelitian selama 7 tahun (2015-2021). Hasil penelitian ini Demokrasi dan Stabilitas Politik berpengaruh negative signifikan dan Korupsi berpengaruh positif signifikan pada pengentasan kemiskinan. Selanjutnya diharapkan penelitian ini dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat di negara-negara Kawasan Asia secara ekonomi dan non ekonomi. Dengan meningkatnya kesejahteraan rakyat maka taraf hidup akan meningkat dan kesenjangan pada aspek kehidupan akan berkurang.

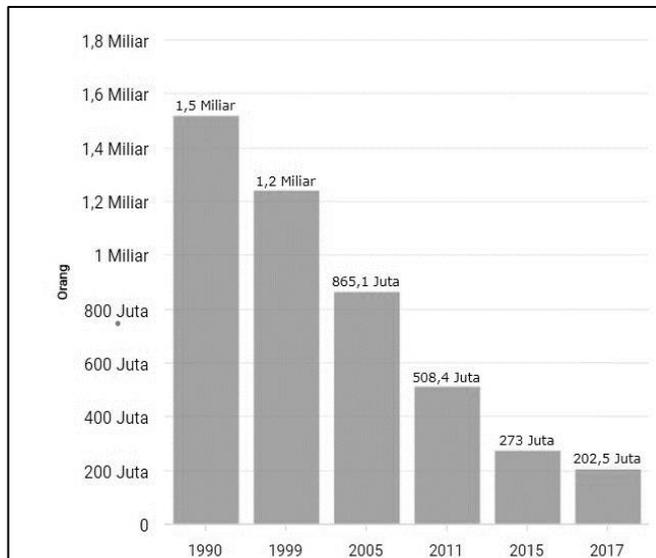
Kata Kunci: Good Governance, Kemiskinan; Metode: Kuantitatif

A. PENDAHULUAN

Kemiskinan adalah bukti kesenjangan multidimensional dan multisektoral yang menyebabkan permasalahan pada keseluruhan aspek seperti ekonomi, politik, sosial, lingkungan, geografis, gender, dan lain sebagainya (Adi, 2005). Luasnya kemiskinan menjadikan pengentasan kemiskinan sebagai tantangan utama bagi pembangunan di abad ke-21. Bank Dunia (World Bank, 2002) mengindikasikan kemiskinan sebagai hidup dengan pendapatan di bawah USD\$1/hari hingga USD\$2/hari (World Bank, 2002). Selanjutnya, menurut Bank Dunia lebih dari 320 juta orang di Kawasan Asia hidup dengan kemiskinan yang ekstrem. Hal ini dapat diartikan bahwa ratusan juta orang hidup dengan pendapatan di bawah USD\$2/hari. Kemiskinan umumnya terjadi di negara berkembang, namun tidak dapat dipungkiri bahwa kemiskinan dapat ditemukan di negara maju. Kawasan Asia terdiri atas negara maju (contoh: Singapura, Korea Selatan, dan Jepang) dan negara berkembang (contoh: Indonesia, Timor Leste, China, dan Bangladesh).

Gambar 1 menunjukkan bahwa terdapat penurunan signifikan pada angka kemiskinan di Kawasan Asia. Setelah MDGs (Millenium Development Goals) dan SDGs (Sustainable Development Goals) di tahun 2017 terdapat

penurunan sebesar 29,1% dari total kemiskinan Kawasan Asia. Namun adanya pandemi Covid-19 sedikit menghambat pengentasan kemiskinan. Dilansir dari laporan Asian Development Bank pada 2021 Southeast Asia Development Symposium (SEADS, 2022), pandemi Covid-19 menyebabkan negara pada Kawasan Asia, khususnya Asia Tenggara yang mana sebanyak 4,7 juta individu masuk ke dalam kemiskinan level ekstrem dan 9,63 juta individu menjadi pengangguran sepanjang tahun 2021 (Asian Development Bank, 2021). Menurut laporan ini pula, di Indonesia terdapat ketidakpastian yang signifikan terhadap risiko penurunan dan atau peningkatan perekonomian negara sehingga memerlukan strategi pengentasan kemiskinan yang menyeluruh.



Gambar 1. Grafik Total Kemiskinan Negara Berkembang di Kawasan Asia (Tahun 1990-2017)

Sumber: Asian Development Bank 2021

Sumber di akses:

<https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/788046/adb-annual-report-2021.pdf>

Pada Tabel 1. terdapat 8 negara teratas yang tergolong sebagai negara miskin di Kawasan Asia. Afghanistan menjadi negara termiskin nomor satu di Kawasan ini, hal ini disebabkan oleh konflik bersenjata, korupsi merajalela di pemerintahannya, serta adanya ketimpangan pendapatan (Ochilov & Najibullah, 2021). Selanjutnya pada peringkat kedua negara termiskin di Kawasan Asia adalah Yemen. Menurut Human Development Index oleh PBB, Yemen merupakan negara paling tidak berkembang yaitu berada di peringkat 183 dari 191 negara. Kemiskinan di Yemen disebabkan oleh perang saudara dan banyaknya praktik korupsi (AL-SHARAFI, 2021). Pada posisi ketiga terdapat Tajikistan yang merupakan negara Asia Tengah. Karakteristik negara Asia Tengah yang fenomenal adalah *“Excessive presidential power and person-centered politics”*. Karakteristik ini membawa Tajikistan sebagai salah satu negara miskin di Kawasan Asia dikarenakan adanya defisit demokrasi atas diktatorisme lembaga eksekutifnya. Emamoli Rahmon merupakan presiden ke-3 Tajikistan sejak tahun 1994 hingga saat ini. Defisit demokrasi ini menunjukkan pula tingkat korupsi yang besar di Tajikistan (Blavatsky, 2021) Dapat disimpulkan dari fenomena di atas, tiga negara miskin teratas di Kawasan Asia memiliki faktor-faktor yang menjadikan negaranya sebagai negara termiskin. Defisit demokrasi, political instability, dan tingkat korupsi tinggi menjadikan negara-negara tersebut sulit keluar dari kemiskinan.

Hal ini selaras dengan beberapa penelitian terdahulu, (Sen, 1987a) menemukan bahwa pengentasan kemiskinan akan meningkatkan demokrasi dan sebaliknya. Dengan adanya demokrasi maka kelaparan dan kemerosotan kesejahteraan sebagai dimensi kemiskinan akan berkurang secara signifikan. Selanjutnya pada studi oleh (Varshney, 2005), mengemukakan bahwa negara-negara demokrasi lebih efektif dalam mengentaskan kemiskinan karena dilakukan metode langsung pada pemberantasan. Hal ini sejalan dengan studi oleh (Sutarto, 2019), yang mana nilai-nilai demokrasi sangat penting untuk diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat sehingga demokrasi dapat tercapai dan menciptakan kesejahteraan sosial dan ekonomi bagi masyarakat. Selanjutnya studi oleh Tebaldi & Mohan, (2010) menemukan bahwa kestabilan politik mendorong pertumbuhan ekonomi meminimalkan konflik dan mengurangi kemiskinan. Penelitian kausalitas antara pengentasan kemiskinan dan korupsi oleh Chetwynd et al., (2003) menyimpulkan tindak pidana korupsi dapat memperkuat kemiskinan

Tabel 1. Top 8 Negara Miskin di Asia

No	Negara	GNI Per Capita
1.	Afghanistan	\$500
2.	Yemen	\$940
3.	Tajikistan	\$1060
4.	Kyrgyzstan	\$1160
5.	Nepal	\$1190
6.	Myanmar	\$1260
7.	Pakistan	\$1280
8.	Korea Utara	\$1286

Sumber World Development Indicators – World Bank Data (Tahun 2020) diakses di:

<https://www.worldbank.org/en/publication/poverty-and-shared-prosperity>

sehingga dibutuhkan program anti korupsi oleh pemerintah sehingga peningkatan kepercayaan publik akan cenderung mengurangi korupsi dan mengurangi kemiskinan. Studi ini kemudian terdukung oleh penelitian Ildirar & İşcan, (2015), yang dalam hal ini korupsi memengaruhi kinerja ekonomi secara langsung dan kinerja ekonomi yang rendah akan menyebabkan kemiskinan. Shabbir et al., (2019) pada studinya menyimpulkan bahwa ada hubungan positif antara kemiskinan dan korupsi, sehingga pengentasan kemiskinan dapat dilakukan dengan strategi pemberantasan korupsi.

Berikut merupakan permasalahan penelitian didasari oleh latar belakang di atas adalah Pertama, Bagaimana demokrasi berpengaruh pada prospek pengentasan kemiskinan di negara-negara Kawasan Asia? Kedua, bagaimana stabilitas politik berpengaruh pada prospek pengentasan kemiskinan di negara-negara Kawasan Asia? dan Ketiga, bagaimana tingkat korupsi berpengaruh pada prospek pengentasan kemiskinan?

Dengan adanya latar belakang ini maka penelitian akan berfokus pada pengentasan kemiskinan dengan substansi peranan penguatan *good governance* dengan dimensi demokrasi, stabilitas politik, dan tingkat korupsi di negara-negara seluruh Kawasan Asia untuk tahun 2015-2021 (7 tahun terakhir). Penelitian ini diharapkan dapat mendorong pengentasan kemiskinan untuk meningkatkan kesejahteraan baik secara ekonomi maupun non-ekonomi rakyat di negara-negara Kawasan Asia. Dengan meningkatnya kesejahteraan ekonomi dan non-ekonomi penelitian ini diharapkan pula dapat memberikan kontribusi pada pemberantasan kesenjangan (*inequality*) negara-negara Kawasan Asia. Selanjutnya untuk sisi pemerintahan, diharapkan pula penelitian ini dapat menjadi *best practice* pada lembaga eksekutif/legislatif/yudikatif untuk memberantas kemiskinan di negaranya.

B. LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN

Teori Sosial-Demokrat: Teori ini dikemukakan Karl Marx yang selanjutnya, melalui (Windia, 2015) teori ini menggambarkan bahwa kemiskinan bukanlah masalah individu melainkan struktural. Adanya favoritisme dan kesenjangan (*inequality*) menghambat masuknya informasi pada aspek sosial, ekonomi, dan politik di kehidupan masyarakat tertentu. Teori ini mengutamakan strukturisasi dan kemampuan pemerintahan negara dalam menyejahterakan masyarakat. Artinya, teori sosial- demokrat mengusahakan adanya kesetaraan di masyarakat sehingga dapat mencapai independensi dan demokrasi di negaranya. Dengan adanya kebebasan dan kesetaraan ini, dapat memungkinkan meningkatnya kesejahteraan masyarakat sebagai bentuk menurunnya kemiskinan di Masyarakat.

Pengentasan Kemiskinan: (Sen, 1987b) mengemukakan bahwa bencana alam bukanlah satu-satunya penyebab kemiskinan dan kelaparan, melainkan diktatorisme. Banerjee & Chaudhury (2010), berdasarkan definisi kemiskinan oleh (Sen, 1987b), berpendapat bahwa kemiskinan bukan hanya terukur dari ketidakmampuan ekonomi tetapi terpengaruh oleh segala aspek sehingga individu sulit untuk memenuhi kehidupannya pada taraf ekonomi, sosial, kesehatan, maupun politik. Terganggunya sebagian besar atas keseluruhan aspek yang ditimbulkan oleh kemiskinan, menjadikan pengentasan kemiskinan sebagai tantangan utama bagi pemerintah di seluruh negara. Kemiskinan merupakan isu multidimensional sehingga seluruh negara di dunia merespon hal ini dengan membuat kesepakatan dengan menyuarakan deklarasi The Millenium Development Goals (MDGs) dan Sustainable Development Goals (SDGs) (Ishatono & Raharjo, 2016). MDGs telah berakhir pada tahun 2015 dan SDGs merupakan program lanjutan yang sedang dilakukan oleh dunia untuk pengentasan kemiskinan. Dari hal gerakan tersebut, dapat disimpulkan kemiskinan merupakan masalah yang menjadi beban seluruh negara di dunia. Terdapat perspektif yang keliru akan pemahaman pengentasan kemiskinan (Huraerah, 2013) antara lain: (1) pengentasan kemiskinan hanya berorientasi pada aspek ekonomi, bukan multidimensional; (2) Fondasi pengentasan kemiskinan hanya berdasar karitatif (menerima bantuan), bukan peningkatan produktivitas masyarakat; (3) Pengentasan kemiskinan mengorientasikan masyarakat miskin sebagai objek bukan subjek yang seharusnya berlaku aktif ikut memberantas kemiskinan; dan (4) Pemerintah merupakan penguasa bukan agen fasilitator pengentasan kemiskinan, yang mana pemerintah tidak berfokus pada apa yang dibutuhkan masyarakat miskin melainkan apa yang mereka miliki.

Atas kekeliruan perspektif di atas, penelitian ini akan berfokus pada dimensi lain untuk pengentasan kemiskinan yaitu pada aspek sosial, politik, dan ekonomi melalui instrumen peran intensifikasi demokrasi, kestabilan politik, dan tingkat korupsi. Ketiga instrumen ini dapat berpengaruh langsung dengan pertumbuhan ekonomi yang menjadi skala akan kemiskinan suatu negara.

Kerangka Pemikiran:



Gambar 2. *State of the Art*

1. Pengaruh Demokrasi Pada Prospek Pengentasan Kemiskinan

Diktatorisme adalah paham yang dalam hal ini suatu pemerintahan negara tidak mengakui hak-hak masyarakatnya sehingga kekuasaan mutlak milik penguasa negara saat itu. Diktatorisme akan melahirkan para pemimpin yang bersifat otoriter (Zedong, 2019). Diktatorisme pada suatu negara menyebabkan lemahnya bahkan tidak adanya demokratisasi. Diktatorisme yang melahirkan pemimpin otoriter tidak menjamin bahwa negaranya dapat terbebas dari kemiskinan. Berikut merupakan negara paling otoriter yang tergolong negara miskin di Kawasan Asia untuk tahun 2021 menurut The Economist Intelligence Unit (EIU): (1) Afghanistan, (2) Myanmar, (3) Korea Utara, (4) Suriah, (5) Turkmenistan.

Demokrasi sendiri memberikan doktrin berupa kekuasaan dari, oleh, dan untuk rakyat. Tidak hanya negara dengan diktatorisme, negara yang menganut paham demokrasi-pun tidak luput dari kemiskinan. Hal ini disebabkan lembaga pemerintahan yang tidak dapat mengimplementasikan nilai-nilai demokrasi. Berikut merupakan negara dengan tingkat demokrasi rendah yang masih memerangi kemiskinan: (1) Indonesia, (2) India, (3) Malaysia, (4) Filipina. Hal ini membuktikan bahwa rendah dan tidak adanya demokrasi membuat negara sulit untuk memerangi kemiskinan.

Selaras dengan hal-hal di atas terdapat penelitian yang mendukung pentingnya demokrasi sebagai dimensi berkausalitas pada pengentasan kemiskinan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat di negaranya (Nasution, 2020; Neudorfer, 2015; Sen, 1987b; Sutarto, 2019; Varshney, 2005) peningkatan demokrasi sendiri dapat dilakukan dengan meningkatnya good governance suatu pemerintahan.

2. Pengaruh Stabilitas Politik Pada Prospek Pengentasan Kemiskinan

Stabilitas politik dibangun atas histori pergantian kekuasaan di suatu negara, keberhasilan lembaga pemerintah dalam menyejahterakan masyarakatnya, dan mitigasi atas ancaman berupa terorisme, kudeta, dan lain sebagainya (Basit & Haryono, 2021; Shehzadi et al., 2019). Terdapat beberapa negara di Kawasan Asia yang lingkungan politiknya tidak stabil sehingga menjerumuskan negaranya pada palung kemiskinan. Penyebab ketidakstabilan ini salah satunya adalah perang. Terdapat beberapa negara di Kawasan Asia yang semakin dilanda kemiskinan akibat peperangan baik antar-sipil ataupun sipil dan militer. Negara di Kawasan Asia yang tidak memiliki kestabilan politik dan semakin dilanda kemiskinan antara lain adalah Afghanistan dan Myanmar. Hal ini selaras dengan beberapa penelitian pendukung yang menyimpulkan bahwa adanya ketidakstabilan politik di suatu negara maka akan semakin sulit negara itu untuk keluar dari kemiskinan (Nasution, 2020; Okwanya & Abah, 2018; Tebaldi & Mohan, 2010; Yolanda, 2019), pengentasan kemiskinan pada sisi stabilitas politik perlu diperhatikan.

3. Pengaruh Tingkat Korupsi Pada Prospek Pengentasan Kemiskinan

Banyak faktor yang menyebabkan kemiskinan terjadi di Kawasan Asia, seperti Bangladesh yang merupakan negara termiskin ketiga di Asia pada tahun 2022. Penyebab kemiskinan di Bangladesh adalah laju pertumbuhan penduduk yang tidak selaras dengan pendapatannya serta tingginya tingkat korupsi di negara ini. Tidak hanya Bangladesh, Indonesia masih jauh berdiri sebagai negara yang jauh dari korupsi. menurut indeks persepsi korupsi

oleh *Transparency International* kedua negara di Kawasan Asia ini belum masuk ke dalam ranking 50 besar negara yang bebas dari korupsi pada tahun 2021.

Menurut *Transparency International*, korupsi mereduksi kepercayaan publik, melemahkan demokrasi, menghambat pembangunan ekonomi, memperjelas ketimpangan yang berujung pada kemiskinan. Negara yang penuh dengan tindak pidana korupsi biasanya masuk ke dalam kategori negara miskin (Waluyo, 2022). Hal ini mengartikan bahwa tingkat korupsi suatu negara berkausalitas dengan tingkat kemiskinan sehingga pengentasan perlu dilakukan. Pemberantasan korupsi merupakan salah satu dimensi pengentasan mengefektifkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat (Fauziah & Lubis, 2022). Kesenambungan ini didukung dengan penelitian-penelitian terdahulu yang menyimpulkan bahwa pengentasan kemiskinan dapat dilakukan dengan memberantas korupsi di suatu negara (Chetwynd et al., 2003; Ildırar & İřcan, 2015b; Nasution, 2020; Neudorfer, 2015; Shabbir et al., 2019; Yolanda, 2019).

Pengembangan Hipotesis:

- H1: Demokrasi secara signifikan berpengaruh positif pada prospek pengentasan kemiskinan di negara Kawasan Asia.
- H2: Stabilitas politik secara signifikan berpengaruh positif pada prospek pengentasan kemiskinan di negara Kawasan Asia.
- H3: Tingkat korupsi secara signifikan berpengaruh positif pada prospek pengentasan kemiskinan di negara Kawasan Asia.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan data sekunder berupa indeks skoring dari *World Development Indicator*, *World Governance Indicator*, dan *Corruption Perception Index*. Masing-masing indeks dirilis oleh lembaga kredibel dunia yaitu Bank Dunia (*World Bank*) dan *Transparency International*. Variabel dependen (X) penelitian ini adalah pengentasan kemiskinan (*poverty*) dan variabel independent (Y) penelitian ini adalah demokrasi sebagai dimensi dari *voice and accountability*, stabilitas politik, dan tingkat korupsi. Populasi yang ada dalam penelitian ini adalah negara-negara di Kawasan Asia dengan syarat adanya ketersediaan data yang untuk 7 tahun selama tahun 2015-2021 pada indeks terkait. Metode analisis regresi data panel akan digunakan untuk penelitian ini. Fokus penelitian adalah mengetahui pengaruh demokrasi, stabilitas politik, dan tingkat korupsi terhadap prospek pengentasan kemiskinan di negara-negara Kawasan Asia selama 7 tahun. Berikut merupakan model ekonometrika untuk penelitian ini:

$$P_{it} = \beta_0i + \beta_1X_{it} + \beta_2X_{it} + \beta_3X_{it} + \epsilon_{it}$$

Keterangan:

P : Kemiskinan (*Poverty*)

X1 : Demokrasi

X2 : Stabilitas Politik

X3 : Tingkat Korupsi

D. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Uji Model Estimasi: Pada penelitian ini, Uji Model Estimasi dilakukan sebelum analisis regresi data panel dengan tujuan untuk memilih model terbaik di antara model *common effect*, *fixed effect*, atau *random effect*. Terdapat tiga uji untuk memilih model terbaik dengan menggunakan software *eviews10* antara lain 1) Chow Test, 2) Hausman Test, dan 3) LM-test. Berikut merupakan hasil dari ketiga uji tersebut.

Tabel 2. Hasil Chow Test Regresi Data Panel Negara Kawasan Asia

Redundant Fixed Effects Tests			
Test cross-section fixed effects – Negara Kawasan Asia			
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	1.277458	(17,105)	0.2215
Cross-section Chi-square	23.687265	17	0.1282

Sumber: EViews 10

Tabel di atas menunjukkan Chow-Test dengan hasil $p\text{-value}=0,000>0,05=\alpha$, yang mana model yang terbaik di antara model *common effect* dan *fixed effect* adalah model *common effect*. Uji selanjutnya yang akan dilakukan adalah Hausman test.

Tabel 3. Hasil Hausman Test Regresi Data Panel Negara Kawasan Asia

Correlated Random Effects - Hausman Test			
Test cross-section random effects - Negara Berkembang			
Effects Test	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	2.472777	3	0.4802

Sumber: EViews 10

Hausman Test di atas menunjukkan hasil $p\text{-value}=0,000>0,05=\alpha$, yang mana model yang terbaik di antara model *fixed effect* dan *random effect* adalah model *random effect*. Setelah Hausman-test dan didapatkan hasil bahwa model terbaik adalah *random effect*, maka selanjutnya peneliti melakukan LM test.

Tabel 3. Hasil Lagrange Multiplier Regresi Data Panel Negara Kawasan Asia

Correlated Random Effects - LMTTest			
Test cross-section random effects - Negara Berkembang			
Breusch-Pagan	Cross-section	Test Hypothesis Time	Both
	2.472777	3	0.4802

Sumber: EViews 10

Pada hasil Hausman Test di atas didapatkan hasil $p\text{-value}=0,000<0,05=\alpha$, yang mana model yang terbaik di antara model *random effect* dan *common effect* adalah model *common effect*. Setelah LM test dan didapatkan hasil bahwa model terbaik adalah *common effect*, maka selanjutnya peneliti melakukan uji asumsi klasik dan analisis regresi data panel dengan model *common effect*.

Hasil Uji Asumsi Klasik: Berdasarkan hasil uji model telah terpilih bahwa model terbaik adalah *common effect* oleh sebab itu uji asumsi klasik yang digunakan adalah multikolinearitas dan heteroskedastisitas (Basuki & Yuliadi, 2014).

a. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas digunakan untuk menentukan apakah ada atau tidak hubungan linear antara variabel independen dalam model regresi. Kehadiran Multikolinearitas dapat diidentifikasi dengan melihat nilai matriks korelasi. Jika nilai matriks korelasi kurang dari 0.85, maka model tersebut tidak mengalami Multikolinearitas, sedangkan jika nilai matriks korelasi lebih dari 0.85, maka model tersebut mengalami Multikolinearitas.

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas Model Regresi Data Panel *Random Effect* Negara Kawasan Asia

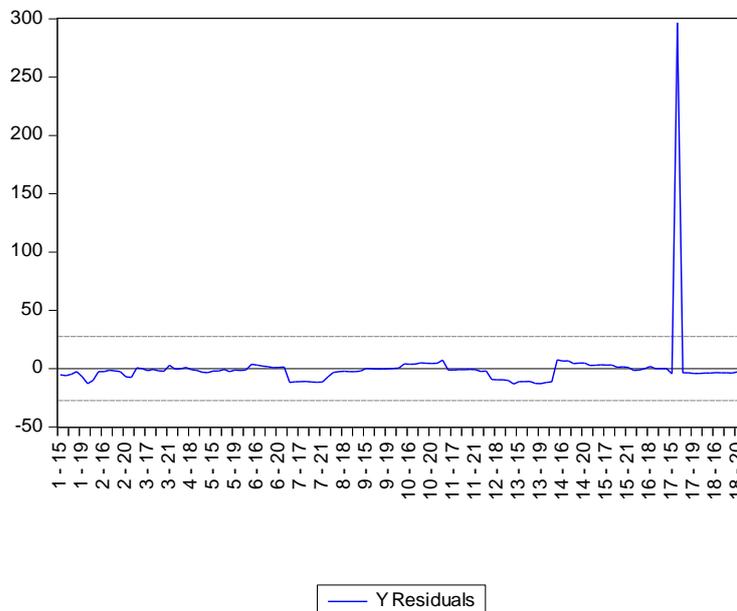
	X1	X2	X3
X1	1.000000	0.222633	0.717679
X2	0.622633	1.000000	0.790244
X3	0.717679	0.390244	1.000000

Sumber: EViews 10

Koefisien korelasi X1 dan X2 adalah sebesar $0.222633 < 0.717679$ selanjutnya koefisien korelasi X1 dan X3 adalah sebesar $0.717679 < 0.790244$, dan koefisien korelasi X2 dan X3 adalah sebesar $0.790244 < 0.85$. Maka dapat disimpulkan bahwa terbebas dari multikolinearitas.

b. Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan Grafik residual (warna biru) menunjukkan garis dari Grafik residual tidak melewati batas (500 dan -500) yang artinya varian residual sama yang membuktikan tidak terjadinya gejala heteroskedastisitas.



Gambar 2. Hasil Uji Heteroskedastisitas Model Regresi Data Panel *Random Effect* Negara Kawasan Asia
 Sumber: EViews 10

Hasil Analisis Pengaruh Regresi Data Panel dengan Menggunakan Common Effect Model: Berikut merupakan hasil pendugaan model data panel common effect, yang mana persamaan fungsi terkait pengentasan korupsi terhadap demokrasi, stabilitas politik, dan tingkat korupsi di negara Kawasan Asia.

Tabel 5. Tabel Hasil Pendugaan Model Panel Common Effect Persamaan Fungsi Pengentasan Kemiskinan terhadap Demokrasi, Stabilitas Politik, dan Tingkat Korupsi di Negara Kawasan Asia

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob,
Konstanta (P)	33.95533	16.73223	2.029336	0.0006***
X1 (D)	-2.572268	4.152780	-0.619409	0.0468**
X2 (PS)	-2.029151	3.620777	-0.560419	0.0489**
X3 (C)	0.053785	0.377129	0.142616	0.0518**
R-squared	0.008			
Adjusted R-squared	-0.016			

Sumber: EViews 10

Ket: ***(Signifikan pada taraf nyata 99%)
 **(Signifikan pada taraf nyata 95%)

Tabel di atas merupakan hasil dari pendugaan model *common effect* regresi data panel dengan perolehan seluruh variabel yaitu Demokrasi (D), Kestabilan Politik (PS), dan Tingkat Korupsi (C) berpengaruh secara signifikan.

Variabel D (X1) pada tingkat kepercayaan 95% berpengaruh negatif pada kemiskinan (P) di negara Kawasan Asia. Berdasarkan pada nilai regresinya, ketika variabel D (X1) di negara Kawasan Asia mengalami kenaikan sebesar 1-unit maka kemiskinan akan naik menurun sebesar -2.572. Intensifikasi demokrasi memberikan platform bagi partisipasi publik yang lebih luas dalam proses pembentukan kebijakan. Dengan adanya mekanisme untuk mengungkapkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat, kebijakan pengentasan kemiskinan menjadi lebih responsif dan inklusif. Meningkatnya demokrasi akan memperkuat pengentasan kemiskinan di negara kawasan Asia. Oleh sebab itu hubungan antara demokrasi dan kemiskinan di negara Kawasan Asia memiliki kompleksitas dan dimensi keterhubungan. Pemerintahan demokratis cenderung lebih berorientasi pada kesejahteraan sosial dan pendidikan. Fokus pemerintah dengan demokrasi yang tinggi juga akan mengarahkan negara pada perancangan program-program sosial untuk mengatasi isu kemiskinan. Perbaikan isu ini dapat berbentuk bantuan sosial, program pendidikan, dan program kesehatan.

Sistem demokrasi memberikan warga negara akses yang lebih besar terhadap partisipasi politik dan pengambilan keputusan. Hal ini merefleksikan partisipasi aktif masyarakat suatu negara, yang mana hal ini akan meningkatkan partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas sehingga pengentasan kemiskinan akan lebih terprogram dan terarah. Partisipasi membuka jalan bagi aspirasi sehingga kesejahteraan masyarakat miskin lebih dapat dipertimbangkan sebagai isu utama untuk diperbaiki baik dari segi finansial maupun sosial. Selanjutnya

transparansi dan akuntabilitas akan mengefektifkan jalannya pemerintahan seperti penyerapan anggaran publik yang mana, pemerintah akan cenderung terbuka dan meminimalisir kecurangan dana. Hal ini memberikan keuntungan yaitu minimnya penyalahgunaan dana sehingga pemerintah dapat lebih fokus untuk mengentaskan kemiskinan. Kolaborasi indikator demokrasi yaitu partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas juga akan memperkuat perlindungan HAM bagi semua masyarakatnya termasuk masyarakat miskin. Dengan adanya perlindungan akan HAM yang kuat maka keikutsertaan masyarakat dalam mengelola negara seperti membuat dan mengontrol kebijakan juga akan semakin kuat yang mana hal ini memunculkan potensi penghambatan pada penyalahgunaan kebijakan oleh pihak tertentu sehingga merugikan masyarakat banyak. Dengan potensi ini pula pengelolaan negara yang baik dapat mengelola tingkat kemiskinan di negaranya.

Brunei adalah salah satu contoh negara di Kawasan Asia yang berbentuk monarki mutlak (kerajaan) dan memiliki dampak terhadap isu kemiskinan di negaranya. Brunei merupakan salah satu negara yang kaya akan sumber daya alam, terutama minyak dan gas. Namun, pendapatan dari sumber daya ini tidak selalu merata di antara penduduk. Meskipun Brunei memiliki tingkat pendapatan per kapita yang tinggi, ketidaksetaraan dalam distribusi pendapatan dan kemiskinan relatif masih ada, terutama di kalangan penduduk miskin. Selanjutnya kekuasaan terpusat pada monarki atau penguasa, akhirnya akses masyarakat biasanya lebih terbatas dalam pengambilan keputusan politik dan pembentukan kebijakan. Hal ini dapat memperburuk prioritas pembangunan dan upaya mengurangi kemiskinan.

Contoh negara lainnya di kawasan Asia dengan tingkat partisipasi masyarakat yang relatif rendah adalah Myanmar. Partisipasi masyarakat yang rendah di sini mengacu pada keterlibatan yang terbatas dari warga dalam proses politik dan pengambilan keputusan. Myanmar telah mengalami beberapa dekade pemerintahan militer dan rezim otoriter yang telah menghambat perkembangan partisipasi masyarakat. Selama periode ini, kebebasan berbicara, berkumpul, dan berpartisipasi dalam kebijakan publik dibatasi, yang telah mengurangi budaya partisipasi masyarakat. Ketidakstabilan politik dan perubahan rezim di Myanmar telah menciptakan ketidakpastian yang membuat masyarakat ragu-ragu untuk terlibat dalam proses politik. Ketidakpastian ini dapat mengurangi minat dan motivasi untuk berpartisipasi. Beberapa budaya di Myanmar mungkin memiliki norma-norma yang menempatkan penekanan pada ketaatan terhadap otoritas dan kepemimpinan yang eksklusif. Hal ini dapat menghambat partisipasi publik karena masyarakat mungkin merasa kurang diizinkan untuk menyuarakan pendapat mereka. Hal-hal tersebut menunjukkan bahwa pentingnya intensifikasi demokrasi demi terwujudnya pengentasan kemiskinan.

Variabel PS (X2) pada tingkat kepercayaan 95% berpengaruh negatif pada kemiskinan (P) di negara Kawasan Asia. Berdasarkan pada nilai regresinya, ketika variabel PS (X2) di negara Kawasan Asia mengalami kenaikan sebesar 1-unit maka kemiskinan akan naik menurun sebesar -2.029. Stabilitas politik menjadi salah satu faktor penting untuk pengentasan kemiskinan. Adanya konflik perpolitikan seperti perubahan kekuasaan dapat mengganggu pelaksanaan program-program pemerintah salah satunya upaya pengentasan kemiskinan. Stabilitas politik dapat menciptakan lingkungan kondusif pada pertumbuhan ekonomi inklusif yang mana akan memberikan kesetaraan dan kesempatan yang sama pada seluruh masyarakatnya. Selanjutnya dapat disimpulkan jika semakin besar kestabilan politik maka akan menurunkan tingkat kemiskinan di negara Kawasan Asia. atas kesimpulan tersebut maka terdapat hubungan yang sangat kompleks antara kestabilan politik dan kemiskinan di negara kawasan Asia, hal ini dapat terlihat keberpengaruhannya satu sama lain yaitu:

- a) Stabilitas politik dapat mendorong pelayanan publik dan peningkatan infrastruktur yang mana hal ini akan memengaruhi kualitas hidup masyarakat yang menurunkan risiko kemiskinan.
- b) Ketersediaan lapangan pekerjaan juga dipengaruhi oleh stabilitas politik, yang mana adanya ketidakstabilan politik akan menghambat pertumbuhan sektor ekonomi, mengurangi investasi, dan menyebabkan pengurangan pekerjaan. Akibatnya, tingkat pengangguran bisa meningkat, dan orang mungkin kesulitan menemukan pekerjaan yang layak, yang pada gilirannya dapat berkontribusi pada peningkatan kemiskinan.
- c) Jika suatu negara memiliki ketidakstabilan politik maka dapat terjadi kerentanan pada kebijakan sosial yang akan sulit untuk melindungi masyarakat. Ketidakstabilan memunculkan ketidaktegasan hukum dan dukungan sosial pada masyarakatnya.
- d) Perubahan pada Kebijakan Sosial: Ketidakstabilan politik dapat mempengaruhi kebijakan sosial yang ditujukan untuk melindungi kelompok rentan dari kemiskinan. Perubahan dalam kebijakan ini bisa memiliki dampak negatif pada mereka yang bergantung pada dukungan sosial.

- e) Kestabilan politik yang rendah dapat menciptakan ketidakpastian ekonomi. Kondisi ekonomi yang tidak stabil dapat mengakibatkan inflasi, penurunan nilai mata uang, dan perubahan tiba-tiba dalam keadaan ekonomi, yang semuanya dapat mempengaruhi daya beli dan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu contoh kasus negara di kawasan Asia yang mengalami ketidakstabilan politik yang berdampak pada tingkat kemiskinan adalah Afghanistan. Konflik berkepanjangan dan perubahan rezim politik di negara ini telah berkontribusi pada masalah sosial dan ekonomi, termasuk kemiskinan yang tinggi. Afghanistan telah melalui serangkaian perubahan rezim politik, termasuk pemerintahan Taliban dan perubahan kekuasaan setelah intervensi militer. Perubahan ini seringkali disertai dengan gangguan ekonomi dan sosial serta ketidakpastian, yang dapat mempengaruhi pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Konflik dan ketidakstabilan politik di Afghanistan telah menyebabkan jutaan orang menjadi pengungsi atau mengungsi dari rumah mereka. Ini berdampak pada pekerjaan, pendidikan, dan kesejahteraan mereka. Banyak dari mereka yang terlantar hidup dalam kondisi kemiskinan.

Selanjutnya di Tajikistan terdapat perang saudara yang berkepanjangan sejak runtuhnya Uni Soviet pada 1990-an yang mana konflik ini berdampak serius pada infrastruktur, ekonomi, dan masyarakat. Pasca-konflik, negara ini menghadapi tugas berat dalam membangun kembali dan mencapai stabilitas politik dan ekonomi. Infrastruktur yang rusak akibat perang dan kurangnya investasi dalam sektor-sektor penting seperti pertanian dan industri dapat menghambat akses masyarakat ke sumber daya dan peluang ekonomi. Hal ini dapat mempengaruhi lapangan pekerjaan, pendapatan, dan kesejahteraan masyarakat. Ketidakstabilan politik dan ketidakpastian ekonomi juga dapat mengganggu pertumbuhan sektor swasta dan investasi. Akibatnya, tingkat pengangguran bisa menjadi masalah serius, terutama di antara pemuda yang semakin mempersulit Tajikistan untuk keluar dari garis kemiskinan.

Variabel C (X3) pada tingkat kepercayaan 95% berpengaruh positif pada kemiskinan (P) di negara Kawasan Asia. Berdasarkan pada nilai regresinya, ketika variabel C (X1) di negara Kawasan Asia mengalami kenaikan sebesar 1-unit maka kemiskinan akan naik meningkat sebesar 0.053. Tingkat korupsi yang tinggi dapat menghambat efektivitas program pengurangan kemiskinan. Selanjutnya dapat disimpulkan jika semakin besar tingkat korupsi maka akan semakin besar tingkat kemiskinan di negara Kawasan Asia. Kemiskinan akan berelasi dengan pertumbuhan ekonomi, tingkat investasi, dan belanja pemerintah yang tidak merata yang mana di sisi lainnya dapat melemah dan menguat sesuai dengan tingkat korupsi di suatu negara (Yolanda, 2019) sehingga secara langsung korupsi akan memengaruhi tingkat kemiskinan suatu negara. Praktik korupsi mengikis anggaran dana negara yang seharusnya digunakan untuk memberikan kesejahteraan pada masyarakatnya. Pemberantasan korupsi yang tegas merupakan komponen penting untuk penyerapan anggaran yang ada digunakan secara maksimal untuk masyarakat bukan kepentingan pribadi, sehingga jika di negara tersebut kemiskinan masih menjadi isu besar maka hal ini dapat dikendalikan dengan baik.

Pada penelitian ini kemiskinan diukur melalui Indeks Gini dengan skor 0-100, yang mana semakin besar skor indeks gini maka semakin besar pula ketimpangan (inequality) yang memicu kemiskinan. Indonesia pada tahun 2020 dan 2021 terukur skor indeks gini sebesar 37 dan 38 (naik 1 skor) dan tingkat korupsi stagnan sebesar 39 pada kedua tahun tersebut menunjukkan bahwa Indonesia masih menjadi negara yang timpang dan memiliki tingkat korupsi yang tinggi. Korupsi di Indonesia terjadi dalam berbagai sektor, baik di sektor pertambangan, perkebunan, kelautan, maupun kehutanan yang di dalamnya terdapat para politisi-pengusaha-penguasa yang berlomba-lomba untuk meraup keuntungan pribadi demi memperkaya diri yang berdampak pada kerugian pada pihak lain. Salah satu kerugian yang ditimbulkan adalah penggunaan sumber daya alam dan manipulasi data keuangan yang tidak ditujukan untuk kesejahteraan rakyat sebagaimana mestinya. Pada sektor pertambangan dari Kementerian Energi, Sumber Daya dan Mineral (ESDM) tercatat telah merugikan negara atau merugikan izin pertambangan resmi (Izin Usaha Pertambangan/IUP) yang mana pada tahun 2019 negara merugi Rp. 1,6 T dan tahun 2022 diestimasikan negara merugi sebesar Rp. 3,5 T. Contoh kasus pemberian izin pertambangan ilegal terjadi di Indonesia pada tahun 2016 yaitu KPK menetapkan Nur Alam (Gubernur Sulawesi Tenggara) sebagai tersangka tindak pidana korupsi dengan dugaan menerima suap yang diestimasikan mencapai Rp.60 miliar terkait IUP di Kabupaten Buton dan Bombana (www.antikorupsi.org). Kasus selanjutnya dari Kementerian Energi, Sumber Daya dan Mineral (ESDM) yang dilansir oleh www.detik.com, yang mana pada tahun 2020-2022 KPK menyatakan terdapat manipulasi penerimaan tunjangan kinerja dari Rp.1,3 miliar menjadi Rp.29 M di kementerian ini yang menimbulkan kerugian negara sebesar Rp.27 M. Trio politisi-pengusaha-penguasa yang korup ini menyebabkan kerugian tidak hanya di sisi keuangan namun secara ekologis Indonesia yang mana merugikan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya sehingga korupsi masih menjadi masalah yang harus diberantas untuk mengentas

kemiskinan. Keterhubungan kemiskinan dan korupsi di Kawasan Asia juga ditunjukkan di negara Kazakhstan, data menunjukkan tahun 2020-2021 pada skor indeks gini dan indeks persepsi korupsinya adalah statis (IG:37/IPK:28). Kasus lain yang mendukung hasil ini adalah skandal korupsi tahun 2021 pada penyalahgunaan dana publik yang seharusnya dialokasikan untuk penanganan pandemi Covid-19 di Kazakhstan. Kasus ini menyoroti alokasi dana yang ditujukan untuk pembebanan pembelian alat medis dan alat pelindung diri tenaga medis dan kesehatan selama pandemi terjadi, namun pada akhirnya para pejabat publik kembali menggunakannya untuk diserap secara pribadi. Selanjutnya pejabat terkait diadili terkait dugaan korupsi dalam penggelapan dana publik untuk mengatasi pandemi. Kasus tindak pidana korupsi ini telah menimbulkan kemarahan di masyarakat Kazakhstan dan menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik, terutama dalam situasi krisis seperti pandemi.

Dari contoh kedua kasus korupsi ini menunjukkan bahwa tingkat korupsi yang masih tinggi akan mempersulit pengentasan kemiskinan di negara manapun, oleh sebab itu Masyarakat dan pemerintah sebagai warga negara harus bekerjasama dan memiliki kesadaran untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan hidup masyarakat yang terbebas dari korupsi.

E. SIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menghasilkan bahwa variabel demokrasi, stabilitas politik dan tingkat korupsi memengaruhi pengentasan kemiskinan di negara Kawasan Asia, yang mana penguatan pada demokrasi dan stabilitas politik memengaruhi secara negatif pada pengentasan kemiskinan sedangkan tingkat korupsi memengaruhi secara positif pada upaya pengentasan kemiskinan di negara Kawasan Asia. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pemerintah negara-negara di Kawasan Asia untuk mengentaskan kemiskinan yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. **Demokrasi:** Penguatan demokrasi meminimalkan lemahnya partisipasi masyarakat pada partisipasi dalam pembentukan kebijakan. Adanya partisipasi pada pembuatan dan penegakan kebijakan oleh masyarakat akan mengarahkan fokus dan tujuan kebijakan ini sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat secara menyeluruh. Yang mana kebijakan yang dibuat tidak akan timpang namun juga memberikan kesempatan yang sama untuk semua kalangan masyarakat. Rendahnya ketimpangan sebagai akibat adanya partisipasi aktif masyarakat dalam kuatnya demokrasi, akan mendorong peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas program pemerintah yang salah satunya adalah program pengentasan kemiskinan.
2. **Stabilitas Politik:** Landasan lain suatu negara dapat mengentaskan kemiskinan adalah dengan kestabilan politik, yang mana dari rendahnya konflik politik. Jika konflik di suatu negara rendah maka akan mengembangkan lingkungan investasi yang kondusif. Lingkungan investasi yang kondusif akan membantu pembangunan lingkungan berkelanjutan yang mendorong pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan pengentasan kemiskinan bagi suatu negara.
3. **Tingkat Korupsi:** Tingkat korupsi yang rendah adalah kunci dalam memastikan bahwa dana publik digunakan dengan tepat dan efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan. Korupsi menggerus sumber daya yang seharusnya dialokasikan untuk layanan publik dan program pengentasan kemiskinan. Penurunan korupsi secara signifikan akan meningkatkan dampak dari upaya pengentasan kemiskinan.

Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan kebijakan, menciptakan stabilitas politik yang berkelanjutan, dan mengurangi tingkat korupsi adalah langkah penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan inklusif dan pengentasan kemiskinan. Dalam menghadapi tantangan ini, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat sipil, dan lembaga internasional dapat berperan dalam membentuk masa depan yang lebih baik bagi negara-negara Kawasan Asia dan warganya.

REFERENSI

- Adi, I. R. (2005). Kemiskinan Multidimensi. *Makara Human Behavior Studies in Asia*, 9(1), 27–33.
- AL-SHARAFI, A. A. L. I. H. (2021). The impact of applying good governance standards in reducing corruption and achieving sustainable development in Yemen. *Ishraqat Tanmawia*, 6(26).
- Asian Development Bank. (2021). *Toward a green and inclusive recovery*. www.adb.org/ar2021/digital
- Banerjee, A., & Chaudhury, S. (2010). Statistics without tears: Populations and samples. *Industrial Psychiatry Journal*, 19(1), 60.
- Bank, W. (2002). *World Bank Atlas 2002*. The World Bank.

- Basit, A., & Haryono, S. (2021). Analisis Pengaruh Stabilitas Politik dan Faktor Ekonomi terhadap Indeks Harga Saham Gabungan: Analisis Pengaruh Stabilitas Politik dan Faktor Ekonomi terhadap Indeks Harga Saham Gabungan. *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, 5(2), 220–237.
- Basuki, A. T., & Yuliadi, I. (2014). *Electronic Data Processing*. Yogyakarta: Danisa Media.
- Blavatsky, P. (2021). Obesity of politicians and corruption in post-Soviet countries. *Economics of Transition and Institutional Change*, 29(2), 343–356.
- Chetwynd, E., Chetwynd, F., & Spector, B. (2003). Corruption and poverty: A review of recent literature. *Management Systems International*, 600, 5–16.
- Fauziah, N. M., & Lubis, R. K. (2022). Sound Governance: Model Kolaborasi Multilevel sebagai Upaya Pencegahan Korupsi dalam Pemerintahan Desa. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara)*, 10(2), 440–451.
- Huraerah, A. (2013). Strategi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 12(1), 3–13.
- Ildırdar, M., & İřcan, E. (2015a). Corruption, Poverty and Economic Performance: Eastern Europe and Central Asia (ECA) Countries. *International Conference on Eurasian Economies*.
- Ildırdar, M., & İřcan, E. (2015b). Corruption, Poverty and Economic Performance: Eastern Europe and Central Asia (ECA) Countries. *International Conference on Eurasian Economies*.
- Ishatono, I., & Raharjo, S. T. (2016). Sustainable development goals (SDGs) dan pengentasan kemiskinan. *Share: Social Work Journal*, 6(2), 159.
- Nasution, I. B. (2020). Good Governance Dalam Mewujudkan Negara Hukum. *Citra Justicia: Majalah Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 21(1), 1–8.
- Neudorfer, N. S. (2015). Development, democracy and corruption: how poverty and lack of political rights encourage corruption. *Journal of Public Policy*, 35(3), 421–457.
- Ochilov, A. O., & Najibullah, E. (2021). How To Reduce Poverty in Afghanistan. *E-Conference Globe*, 114–117.
- Okwanya, I., & Abah, P. O. (2018). Impact of energy consumption on poverty reduction in Africa. *CBN Journal of Applied Statistics*, 9(1), 105–139.
- Sen, A. (1987a). *Food and freedom*.
- Sen, A. (1987b). *Food and freedom*.
- Shabbir, M. S., Abbas, M., Aman, Q., Ali, R., & Orangzeb, K. (2019). Poverty Reduction Strategies. Exploring the link between Poverty and Corruption from less developed countries. *Dilemmas Contemporaneous: Education, Política y Valore*, 6(2).
- Shehzadi, I., Siddique, H. M. A., & Majeed, M. T. (2019). Impact of political instability on economic growth, poverty and income inequality. *Pakistan Business Review*, 20(4), 825–838.
- Sutarto, D. (2019). Implementasi nilai demokrasi sebagai solusi bagi pengentasan kemiskinan dan kesenjangan sosial. *Petita*, 1(1), 75–86.
- Tebaldi, E., & Mohan, R. (2010). Institutions and poverty. *The Journal of Development Studies*, 46(6), 1047–1066.
- Varshney, A. (2005). Democracy and poverty. *Measuring Empowerment: Cross-Disciplinary Perspectives*, 383–401.
- Waluyo, B. (2022). *Pemberantasan tindak pidana korupsi: Strategi dan optimalisasi*. Sinar Grafika.
- Windia, W. (2015). Sekali Lagi Tentang Pengentasan Kemiskinan (Di Bali). *Piramida*, 11(1), 1–7.
- Yolanda, Y. (2019). Pengaruh Korupsi, Demokrasi Dan Politik Terhadap Kemiskinan Di Delapan Negara ASEAN Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Pembangunan*, 1(3), 845–854.
- Zedong, M. (2019). On the people's democratic dictatorship. In *Ideals and Ideologies* (pp. 291–300). Routledge.